



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto selama tahun 2023 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menggambarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari 6 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 3 indikator kinerja kegiatan yang mencapai atau melebihi target dan 4 indikator tidak mencapai target yaitu:

1. Angka Harapan Hidup (AHH) realisasinya 73,25 dari target 72,95 dengan capaian kinerja 100,41%;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasinya 84,58 dari target 85,49 dengan capaian kinerja 98,94%;
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah realisasinya 87,30 dari target 87,50 dengan capaian kinerja 99,77%;
4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah realisasinya 88,94% dari target 90,40% dengan capaian kinerja 98,38%;
5. Indeks Profesionalitas ASN realisasinya 87,40 dari target 70 dengan capaian kinerja 124,86%; dan
6. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan realisasinya 4 inovasi dari target 4 inovasi dengan capaian kinerja 100%.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, anggaran atas kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 secara keseluruhan dinilai tercapai atau efisien. Meskipun demikian, capaian anggaran yang sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan program/kegiatan/sub kegiatan dinilai belum optimal. Untuk kedepannya perlu dilakukan inovasi-inovasi yang lebih kreatif lagi untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang diemban Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan dalam pedoman yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*. Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun LKJIP yang telah menyelesaikan laporan kinerja ini. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran perbaikan dari berbagai pihak terkait sangat kami harapkan.

Mojokerto, Januari 2024
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



dr. ULUM ROKHMAT ROKHMAWAN, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741113 200604 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN	8
B. TUGAS FUNGSI DINAS KESEHATAN	9
C. ISU STRATEGIS	14
D. CASCADING KINERJA	14
E. PETA PROSES BISNIS	21
F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. RENCANA STRATEGIS	25
B. PERJANJIAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA	35
B. REALISASI ANGGARAN	64
BAB IV PENUTUP	85
LAMPIRAN	87
1. PERJANJIAN KINERJA APBD 2023	87
2. PERJANJIAN KINERJA PAPBD 2023	91
3. DATA PENDUKUNG LAINNYA	93
A. PRESTASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023	93
B. INOVASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023	95
C. IKU DINAS KESEHATAN	97
D. SOP PENYUSUNAN LKJIP	102
E. SOP PENGUMPULAN DATA	104
F. SOP PENGUKURAN KINERJA	105
G. SK TIM PENYUSUN LKJIP 2023	106

DAFTAR TABEL

Halaman	
Tabel 1.1. Cascading Kinerja Dinas Kesehatan	16
Tabel 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan	22
Tabel 1.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP dan LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2022-2023	24
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023	31
Tabel 2.2 Tabel Indikator Kinerja Dinas Kesehatan 2023 sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	32
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	35
Tabel 3.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023	36
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya	44
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 s.d. Akhir Periode Renstra	44
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022-2023 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022-2023	45
Tabel 3.6 Analisis Permasalahan Penyebab Peningkatan atau Penurunan Kinerja dan Solusi Yang Dilakukan	46
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Anggaran Atas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023	63
Tabel 3.8 Program/kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023	63
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023	65
	64

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023	23
Grafik 3.1 Nilai IKM Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023	38
Grafik 3.2 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023	40
Grafik 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020-2023	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Logical Framework Dinas Kesehatan	15
Gambar 1.2 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan	16
Gambar 1.3 Gambaran Proses Bisnis Pencapaian Misi I Dinas Kesehatan	22
Gambar 1.4 Gambaran Proses Bisnis dan Cascading Upaya Penurunan AKI dan AKB	23

BAB I PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto selama tahun 2023 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), yang terdiri dari RSUD Prof Dr Soekandar dan RSUD RA Basoeni

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang terdiri dari 27 Puskesmas dan 1 Laboratorium Daerah. Berikut UPTD Dinas Kesehatan:

1. Puskesmas Sooko
2. Puskesmas Trowulan
3. Puskesmas Tawangsari
4. Puskesmas Puri
5. Puskesmas Gayaman
6. Puskesmas Bangsal
7. Puskesmas Lespadangan
8. Puskesmas Gedeg
9. Puskesmas Kemlagi
10. Puskesmas Kedungsari
11. Puskesmas Dawarblandong
12. Puskesmas Kupang
13. Puskesmas Jetis
14. Puskesmas Mojsari
15. Puskesmas Modopuro
16. Puskesmas Watukenongo
17. Puskesmas Pungging
18. Puskesmas Manduro
19. Puskesmas Ngoro
20. Puskesmas Dlanggu
21. Puskesmas Kutorejo
22. Puskesmas Pesanggrahan
23. Puskesmas Pandan
24. Puskesmas Pacet
25. Puskesmas Trawas
26. Puskesmas Gondang
27. Puskesmas Jatirejo
28. Laboratorium Kesehatan Daerah

B. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, tugas Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berikut uraian tugas Sekretariat, dan 4 Bidang di Dinas Kesehatan:

1) Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
- e) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan semua rencana kegiatan UPTD di lingkungan Dinas;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan

meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- b) Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
- c) Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.
- e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Dalam melaksanakan tugas, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a) Perumusan bahan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza);
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza);

- c) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza);
- e) Pelaksanaan pemantauan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza);
- f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan serta jaminan kesehatan;
- c) Pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan

tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehata serta jaminan kesehatan;

- d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehata serta jaminan kesehatan;
- e) Pelaksanaan pemantauan di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehata serta jaminan kesehatan;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d) Perumusan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Isu strategis disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan, telaahan visi misi kepala daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Berikut isu strategis Dinas Kesehatan:

1. Penurunan AKI dan AKB yang masih lambat
2. Prevalensi Stunting yang masih tinggi
3. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
4. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat
5. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis Tenaga
6. Pemenuhan Peralatan Kesehatan yang terstandar yang belum optimal
7. Pengembangan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan yang masih belum optimal.

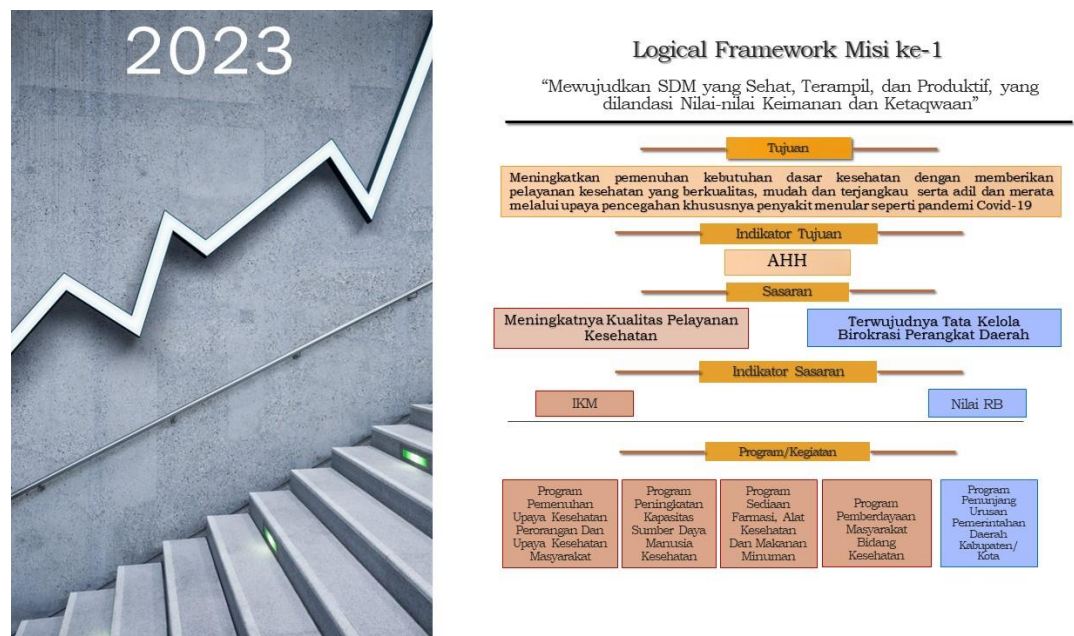
D. CASCADING KINERJA

Cascade merupakan suatu gambaran yang merepresentasikan sesuatu yang disusun dan dialirkan secara menurun. Didalam kaitannya dengan kinerja, cascade diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling rendah yaitu sampai tingkat individu sehingga terjadi keselarasan peran diseluruh tingkat unit organisasi.

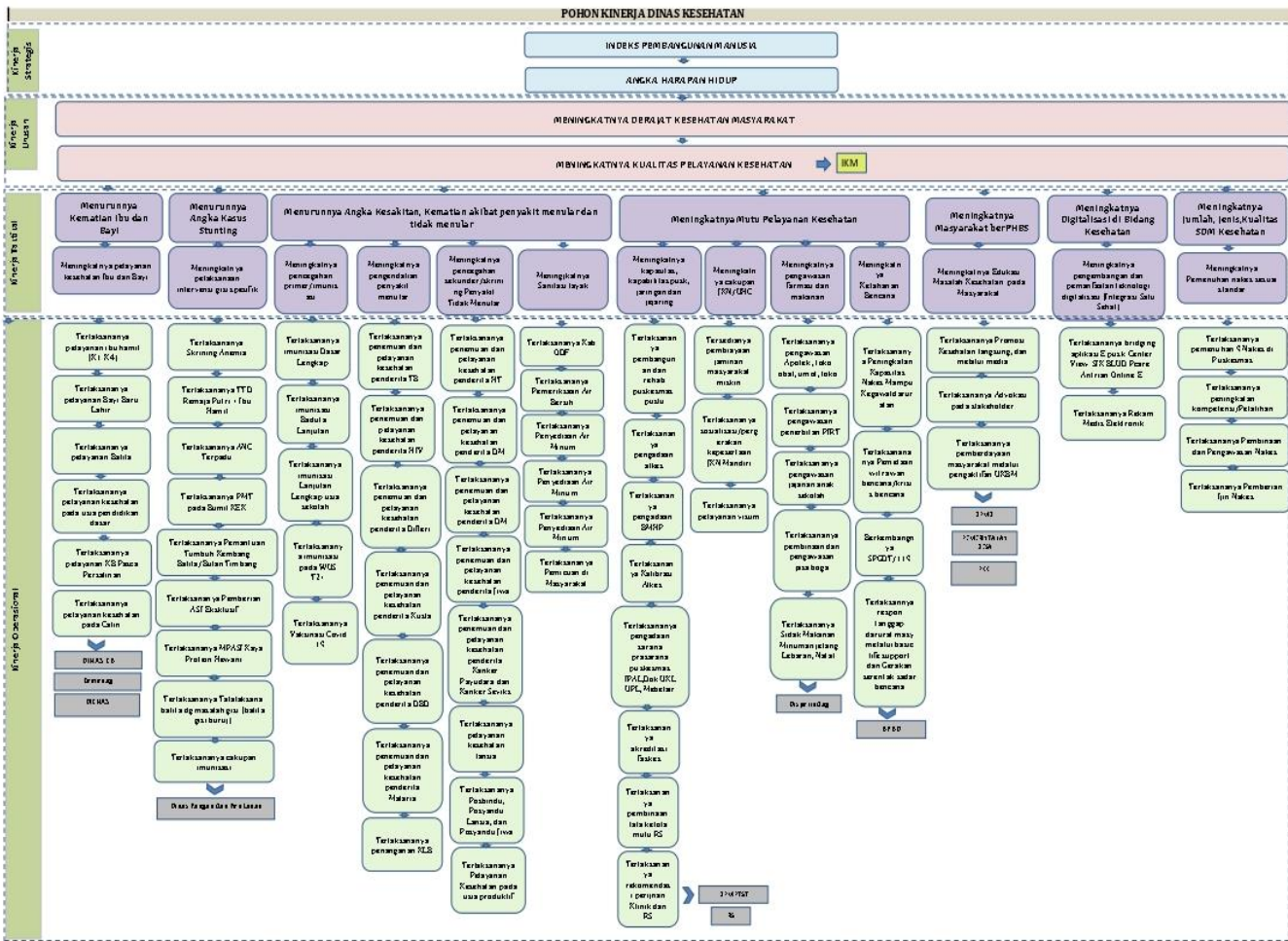
Penurunan dan penyelarasan ini dilakukan pada komponen rencana strategis dimulai dari visi hingga kegiatan.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan strategis Perangkat Daerah dengan merujuk kepada tugas tugas pokok dan fungsi sebagai *business core* Perangkat Daerah. Target-target nasional seperti SPM dan SDG's juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menganalisis *business core* Perangkat Daerah dalam rangka mengidentifikasi tujuan strategis tersebut. Tujuan strategis ini yang kemudian dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Langkah selanjutnya adalah menjabarkan dan menyelaraskan tujuan strategis kedalam sasaran strategis, program, dan kegiatan yang terkait pada tugas pokok dan fungsi unit kerja Perangkat Daerah terkait. Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.

Berikut bentuk dari cascading kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang penyusunannya diawali dengan penetapan *logical framework* sesuai visi misi kepala daerah terpilih dan pohon kinerja Dinas Kesehatan:



Gambar 1.1 Logical Framework Dinas Kesehatan



Gambar 1.2 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan

DINAS KESEHATAN				
TUJUAN OPD (SASARAN PEMDA)				
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19				
INDIKATOR TUJUAN				
AHH				
SASARAN				
Meningkatnya Ketersediaan Fasyankes dan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu				Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
INDIKATOR SASARAN				
IKM Bidang Kesehatan				Nilai SAKIP
PROGRAM				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR PROGRAM				
AKI	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan :	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

AKB	kesehatan sesuai standar	Apotik	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah
Persentase Stunting		Toko Obat		Indeks Profesionalitas ASN
Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna		Umot		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan
Persentase KLB yang ditangani		PIRT		
Persentase ODF				
Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)				
Persentase kunjungan masyarakat ke faslitas kesehatan : R Jalan dan R Inap				
Persentase Indikator SPM yang mencapai target				
Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar				
Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar				
KEGIATAN				
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				7. Peningkatan Pelayanan BLUD

SUB KEGIATAN				
1.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2.1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.3 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3.1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.4 Pengadaan Bahan Habis Pakai		2.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.5 Pengadaan Obat, Vaksin		3.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
1.6 Pemeliharaan prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		5.1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		6.1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		6.2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga		4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				4.6. Penyediaan Bahan/Material
2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				4.7. Fasilitas Kunjungan Tamu
2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				4.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				5.2. Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				6.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 35 Unit (15 Mobil dan 20 Sepeda motor)
2.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6.3. Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 35 Unit (15 Mobil dan 20 Sepeda motor)
2.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.19. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				7.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2.20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
2.21. Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
2.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				
2.23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				
2.26. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
2.27. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
2.28. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah				
2.29. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				
2.30. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
2.31. Operasional Pelayanan Puskesmas				
2.32. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
2.33. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
2.34. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
2.35. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
2.36. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
2.37 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui Pendekatan Keluarga				
2.39. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				

3.1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				
3.2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
2.39. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				
3.1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				
3.2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				
4.2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
4.3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				

Tabel 1.1 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan

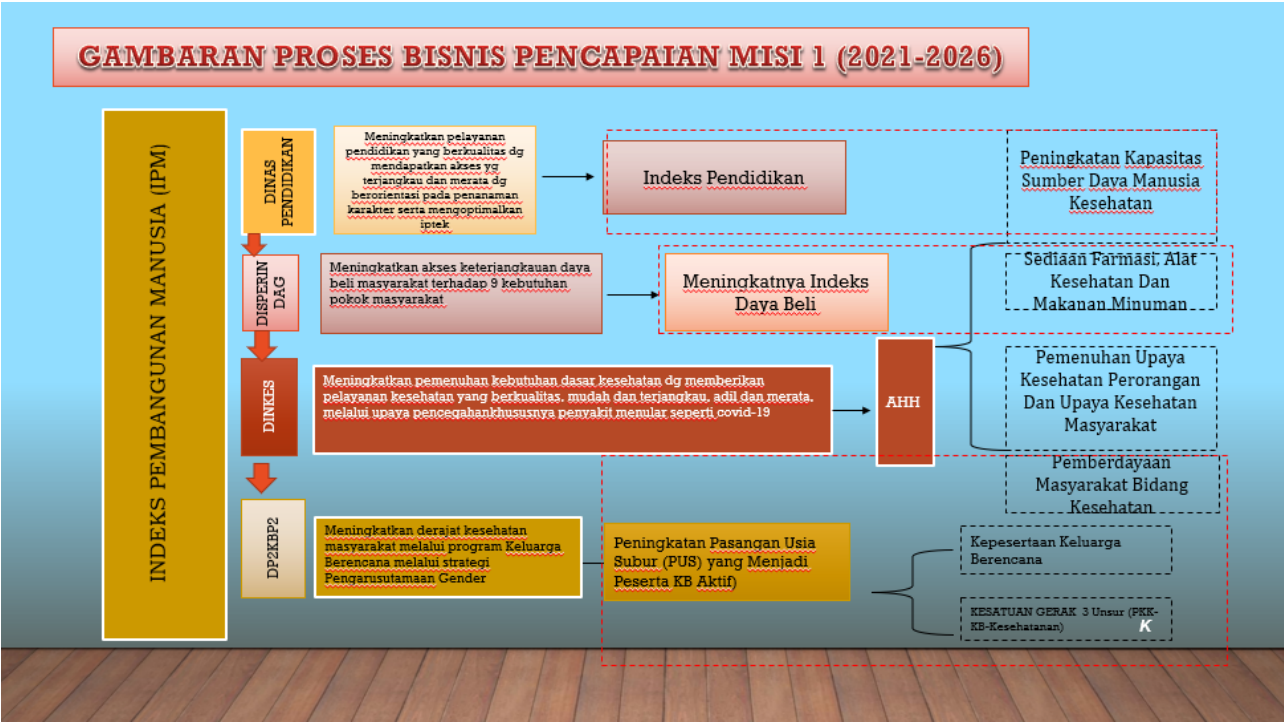
E. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Berikut gambaran peta proses bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto:

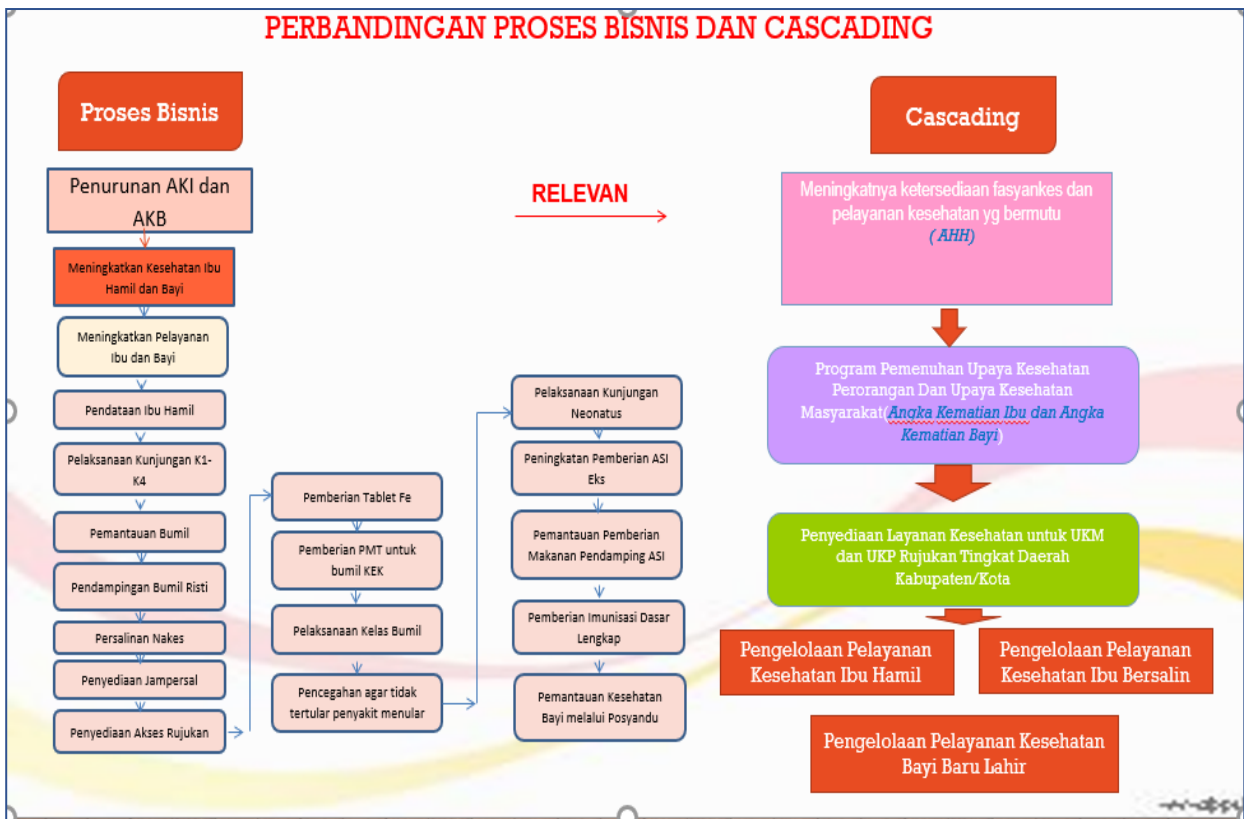
Level 0	Level 1	Level 2	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Utama
P.3 Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	P.3.1. Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas Indonesia serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEKas dengan mendapatkan akses yang terjangkau daan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa	P.3.1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu layanan pendidikan	Dinas Pendidikan
	P.3.2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau dengaan	P.3.2.1 Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu	Dinas Kesehatan

	adil dan merata mellaui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi covid 19		
P.3.3. Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat		P.3.3.1. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Disperindag
		P.3.3.2. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	
		P.3.3.3 Meningkatnya Produktivitas dan daya saing	
P.3.4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia		P.3.4.1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	DP2KBP2
P.3.5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban Masyarakat		P.3.5.1 Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat	Bakesbangpol
		P.3.5.2 Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Satpol PP
		P.3.5.3 Tercapainya kerukunan antar dan inter agama serta tersedianya sarana dan fasilitas keagamaan	Bag Kesra

Tabel 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan



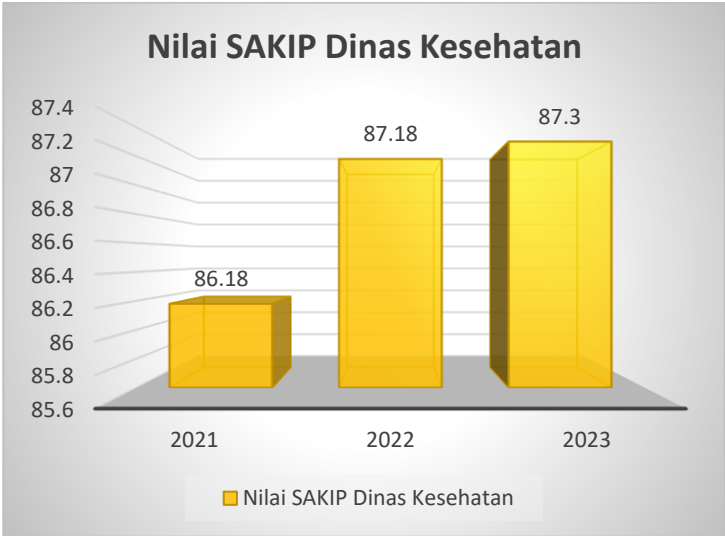
Gambar 1.3 Gambaran Proses Bisnis Pencapaian Misi I Dinas Kesehatan



Gambar 1.4 Gambaran Proses Bisnis dan Cascading Upaya Penurunan AKI dan AKB

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi APIP terhadap sistem akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022, Dinas Kesehatan mendapatkan nilai 87,30 (A). Apabila dibandingkan tahun 2021-2022 nilai SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2023 mengalami peningkatan. Sebagaimana gambaran capaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2021-2023 berikut ini:



Grafik 1.1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023

Dalam evaluasi SAKIP, juga dilaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dokumen Laporan Kinerja. Berikut rekomendasi hasil evaluasi terhadap SAKIP dan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022:

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Memastikan penetapan target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada capaian tahun sebelumnya dan perhitungan yang logis sebagai upaya adanya perbaikan kinerja.	Menganalisa target kinerja yang ditetapkan dengan berdasar pada capaian tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan upaya perbaikan kinerja dan ketersediaan anggaran.
2	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas RATL (Rencana Aksi tindak lanjut) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan.	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas RATL (Rencana Aksi tindak lanjut) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan.
3	Menyusun laporan kinerja secara berkala (Triwulan), sebagai mana rencana aksi yang diterapkan.	Menganalisa hasil capaian kinerja per triwulan melalui aplikasi epuskesmas dan tabel E.81 yang diunduh dari aplikasi Aksara.
4	Menyusun SOP perbaikan data jika terjadi kesalahan data.	Menyusun SOP perbaikan data jika terjadi kesalahan data.
5	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output kinerja Perangkat Daerah.	Melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja bulanan dengan dihadiri pimpinan.

Tabel 1.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP dan LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2022-2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan

Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah untuk mendukung Misi Nomor 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dengan Tujuan yaitu “Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19” dengan indikator tujuan “Angka Harapan Hidup”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran yaitu “Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu” dan “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel”. Pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto setelah dilakukan perubahan Renstra adalah IKM Bidang Kesehatan dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

VISI	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
MISI	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan				
Tujuan	Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi
	Uraian	Indikator Kinerja			
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	1	AHH	Meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat	Peningkatan akses Pelayanan kesehatan masyarakat
		2	IKM	Memperkuat intervensi perubahan perilaku dengan penerapan PIS-PK secara menyeluruh	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
				Meningkatkan regulasi dan tata Kelola program Kesehatan Masyarakat yang berkesinambungan dan terintegrasi	Penguatan pemberdayaan masyarakat
				Meningkatkan Upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan teknologi	Penguatan tata Kelola program, manajemen dan klinis
				Memperkuat kolaborasi lintas program/lintas sektor	
				Memperkuat pemberdayaan Masyarakat, kemitraan, dan peran swasta	
				Advokasi Germas kepada Pemda dan Perangkat Daerah lainnya	
				Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	
		3	SAKIP	Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kesehatan	Peningkatan kapasitas pengolah data yang ada
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan tatakelola yang ada

2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan Renstra 2021-2026 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, maka dilaksanakan pemetaan program dan kegiatan tahun 2023 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dinas Kesehatan memiliki 5 Program yang terdiri dari:

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
	Kegiatan:
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub kegiatan:
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan:
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub kegiatan:
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Kegiatan:
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub kegiatan:
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyediaan Bahan / Material
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Kegiatan:
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
	Sub kegiatan:
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan:
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub kegiatan:
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan:

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
	Peningkatan Pelayanan BLUD
	Sub kegiatan:
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Kegiatan:
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
	Sub kegiatan:
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Pengadaan Obat, Vaksin
	Pengadaan Bahan Habis Pakai
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga
	Kegiatan:
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten / Kota
	Sub kegiatan:
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
	Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat
	Operasional Pelayanan Puskesmas
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
	Kegiatan:
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	Sub kegiatan:
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Kegiatan:
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
	Sub kegiatan:
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Kegiatan:
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota
	Sub kegiatan:
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Kegiatan:
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota
	Sub kegiatan:
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
	Kegiatan:
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Sub kegiatan:
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Kegiatan:

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	Sub kegiatan:
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	Kegiatan:
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Sub kegiatan:
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Kegiatan:
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Sub kegiatan:
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Kegiatan:
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
	Sub kegiatan:
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Kegiatan:
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
	Sub kegiatan:
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Kegiatan:
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
	Sub kegiatan:
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Kegiatan:
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
	Sub kegiatan:
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

B. PERJANJIAN KINERJA

Setiap sasaran telah ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Rumusan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp 211.531.337.212. Berikut Indikator Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	AHH	72,95
		IKM	85,49
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	85,17
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50
		Rata-rata capaian indikator program:	80%
		- AKI 48,94/100.000 KH;	
		- AKB 4.4/100,000 KH;	
		- Persentase Stunting 3%;	
		- Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 34.00% (10 puskesmas)	
		- Persentase Desa KLB 56.00% (169 desa);	
		- Persentase ODF (desa ODF) 100%	
		- Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	
		- Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap 99,65% dan 6,4%	
		- Persentase Indikator SPM yang mencapai target 83,3% (10 indikator)	
		- Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar 99,26%	
		- Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar 90%	
		- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar 75%	
		- Persentase Apotik yang memenuhi standar kesehatan 57% (55 apotek)	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		- Persentase Toko Obat yang memenuhi standar kesehatan 100% - Persentase Umot yang memenuhi standar kesehatan 100% - Persentase penerbitan sertifikat PIRT 81% (120 sertifikat) - Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan 20% - Persentase Rumah Tangga BerPHBS 85% - Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif 98%	90,40%
		- Indeks Profesionalitas ASN	70
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketersediaan anggaran tahun berkenaan, maka rumusan sasaran dan indikator sasaran disusun dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sesuai DPA P-APBD Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 250.634.361.490,-. Berikut Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	AHH		72,95
		IKM		85,49

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,40%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	70

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

Tabel 2.2 Tabel Indikator Kinerja Dinas Kesehatan 2023 sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto berkewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan target sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Tingkat Realisasi Negatif:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \text{ atau}$$

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	AHH	72,95	73,25	100,41 %
	IKM	85,49	84,58	98,94 %

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50	87,30	99,77 %
	1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,40%	88,94%	98,38 %
	1.3	Indeks Profesionalitas ASN	70	87,40	124,86 %
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	4 Inovasi	100 %

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023

Dari 6 indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2023, sebanyak 3 indikator kinerja belum mencapai target antara lain IKM, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah. Sedangkan 3 indikator lainnya yaitu AHH, Indeks Profesionalitas ASN dan Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan capaiannya melebihi target. Berikut gambaran singkat capaian masing-masing indikator kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023:

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program. Berikut capaian AHH Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2023 menurut data BPS Provinsi Jawa Timur:

<https://jatim.bps.go.id/indicator/26/29/1/angka-harapan-hidup.html>

The screenshot shows the official website of Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. The header includes the logo and name of the institution, navigation links in Indonesian and English, and search options. The main content area displays a table titled 'Angka Harapan Hidup (Tahun)' for various districts in East Java. The table has columns for the district name and the life expectancy for the years 2021, 2022, and 2023. A red box highlights the row for Kabupaten Mojokerto, which shows values of 72,59 for 2021, 72,93 for 2022, and 73,25 for 2023.

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	72,07	72,48	72,86
Kabupaten Ponorogo	72,85	73,20	73,55
Kabupaten Trenggalek	73,86	74,26	74,64
Kabupaten Tulungagung	74,16	74,54	74,91
Kabupaten Blitar	73,61	73,98	74,34
Kabupaten Kediri	72,65	72,97	73,27
Kabupaten Malang	72,61	72,95	73,26
Kabupaten Lumajang	70,21	70,61	70,96
Kabupaten Jember	69,28	69,68	70,03
Kabupaten Banyuwangi	70,72	71,06	71,38
Kabupaten Bondowoso	66,89	67,29	67,60
Kabupaten Situbondo	69,24	69,62	69,94
Kabupaten Probolinggo	67,36	67,78	68,12
Kabupaten Pasuruan	70,25	70,55	70,81
Kabupaten Sidoarjo	74,06	74,36	74,69
Kabupaten Mojokerto	72,59	72,93	73,25
Kabupaten Jombang	72,49	72,86	73,22
Kabupaten Nganjuk	71,60	71,95	72,28
Kabupaten Madiun	71,50	71,90	72,28
Kabupaten Magetan	72,65	72,97	73,29
Kabupaten Ngawi	72,41	72,81	73,20

(sumber: <https://jatim.bps.go.id/indicator/26/29/1/angka-harapan-hidup.html>)

Tabel 3.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

Dari data diatas, angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. AHH merupakan gambaran suatu kondisi wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dari peningkatan nilai AHH tersebut, menjelaskan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,25 tahun, meningkat 0,32 tahun dibanding bayi yang lahir pada tahun 2022. Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di suatu wilayah akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Banyak hal yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya Angka Harapan Hidup, antara lain: kematian ibu dan bayi, kematian balita, kematian karena

penyakit pada remaja, dewasa, dan usia produktif, kematian karena kecelakaan, umur penduduk diatas 76 tahun. Untuk itu, berbagai Upaya untuk menaikkan AHH dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan primer maupun rujukan, pencegahan wasting/stunting melalui pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui skrining, imunisasi bayi dan balita, perbaikan Kesehatan lingkungan, dsb.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

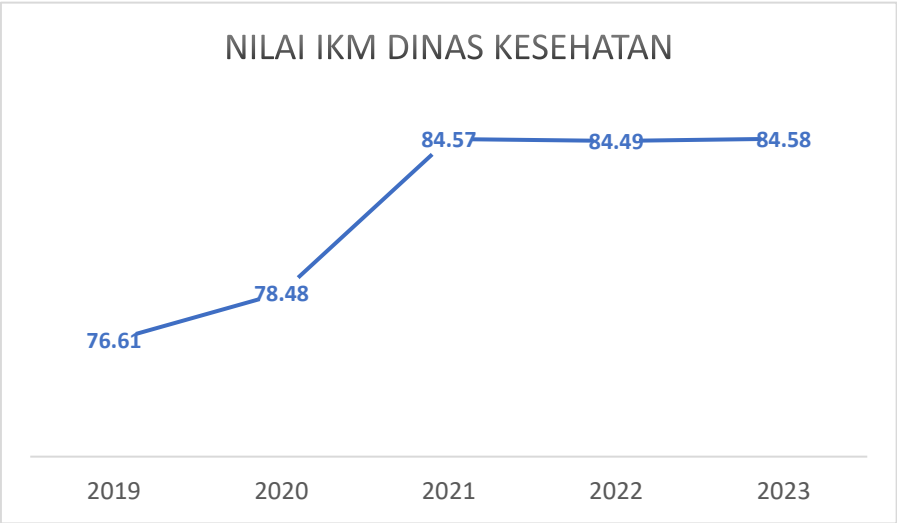
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Menurut SK IKU Dinas Kesehatan 2023, IKM adalah nilai yang dihasilkan dari Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di UPT dan Unit Perijinan Dinas Kesehatan. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan IKM secara mandiri menggunakan aplikasi eSukma dengan sampel Dinas Kesehatan, 27 UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.

Pada IKM ada 9 unsur yang diukur antara lain:

- 1) Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) Biaya/tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

- 6) Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7) Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Survey IKM Dinas Kesehatan dilaporkan dalam Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahunnya. Laporan dapat diakses melalui menu download pada website Dinas Kesehatan Mojokerto. Rangkuman nilai IKM Dinas Kesehatan tahun 2019-2023 bisa dilihat pada grafik berikut:



(sumber: Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2019-2023)

Grafik 3.1 Nilai IKM Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023

Dari grafik diatas, IKM Dinas Kesehatan mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021, namun ada penurunan pada tahun 2022 dan kembali naik di tahun 2023. Di tahun 2023, indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebesar 84,58 dengan mutu pelayanan B atau baik. Dari 9 unsur yang dinilai, unsur tarif/biaya mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu 3,45. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Masyarakat adalah gratis tanpa ada pemungutan biaya apapun. Sedangkan unsur dengan

rata-rata nilai terendah 3,22 yaitu penanganan pengaduan, saran dan masukan menjadi menjadi prioritas perbaikan untuk kedepannya. Dari hasil tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan antara lain:

- 1) Menghimbau petugas Pelayanan pengaduan untuk menangani pengaduan sesuai SOP.
- 2) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan pengaduan masyarakat agar lebih cepat dan tepat dalam merespon pengaduan yang masuk sehingga laporan dapat segera ditindaklanjuti.
- 3) Mensosialisasikan pada Masyarakat penerima layanan Kesehatan tentang alur pelayanan/pengaduan dan SOP penanganan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik kepada pengguna layanan.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi SAKIP ini dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkelanjutan.

Dari SAKIP akan diketahui bahwa setiap rupiah anggaran yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebenarnya memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat. Dalam makna yang lain evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara. Dalam IKU Dinas Kesehatan 2023, formulasi Nilai SAKIP adalah Nilai yang dihasilkan dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

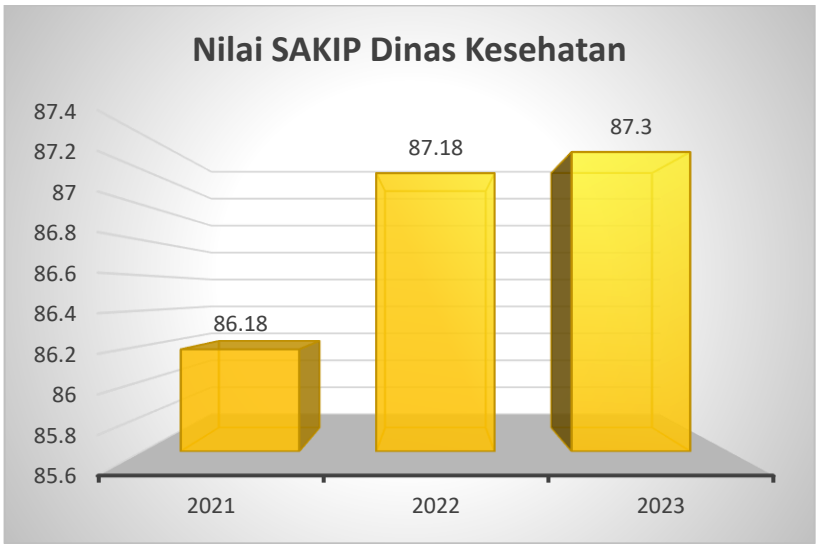
Hasil evaluasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai kisaran 0-100, kemudian diberikan kategori peringkat dengan kriteria sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,30
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	87,30

Berdasarkan peringkat tersebut, nilai SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah 87,30. Kemudian akumulasi nilai tersebut diinterpretasikan sesuai kategori berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	>0-30	Sangat Kurang

Sehingga Dinas Kesehatan masuk dalam predikat A (memuaskan). Nilai SAKIP Dinas Kesehatan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut nilai SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP:



(sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan 2021-2023)

Grafik 3.2 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023

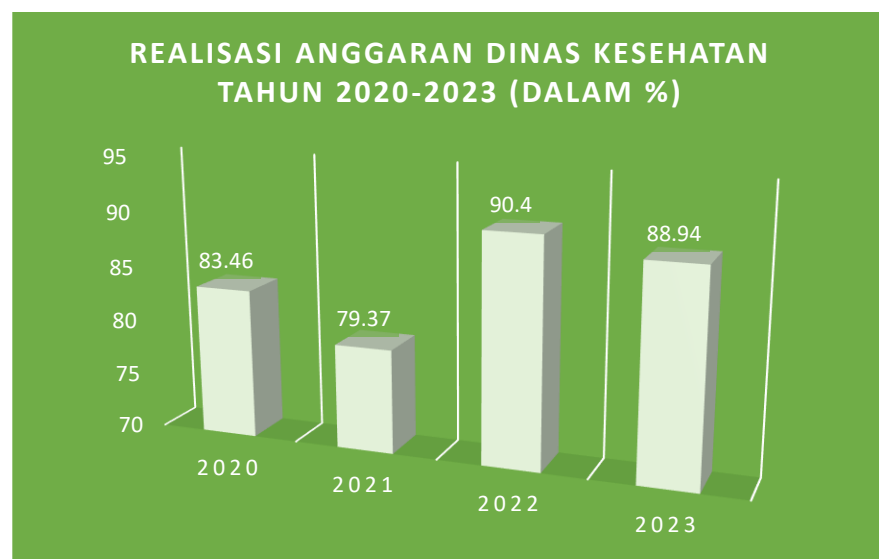
Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan komitmen Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Namun nilai tersebut belum dapat memenuhi target nilai SAKIP tahun 2023 yaitu 87,50. Hal ini dikarenakan adanya mutasi pegawai yang bertugas sebagai Tim SAKIP Dinas Kesehatan sehingga pemenuhan data dukung kinerja kurang optimal. Kedepannya, Tim SAKIP Dinas Kesehatan akan berusaha lebih optimal lagi dalam melengkapi data dukung penilaian kinerja khususnya SAKIP.

4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget).

$$\text{Persentase realisasi anggaran} = \frac{\text{Jumlah realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah anggaran yang tersedia}} \times 100\%$$

Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi. Pada tahun 2023, capaian realisasi anggaran adalah 88,94% yang mana menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 90,40%. Meskipun demikian, realisasi anggaran dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, yaitu 2020-2021, telah terjadi peningkatan capaian realisasi yaitu di tahun 2020 sebanyak 83,46%, sedangkan di tahun 2021 sebesar 79,37% sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:



(sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan)

Grafik 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020-2023

5. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup:

- 1) Dimensi kualifikasi. Mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
- 2) Dimensi kompetensi. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- 3) Dimensi kinerja. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Tingkat Profesionalitas ASN adalah: a. Sangat Tinggi, yang memiliki rentang nilai antara 91– 100; b. Tinggi, yang memiliki rentang nilai antara 81–90; c. Sedang, yang memiliki rentang nilai antara 71–80; d. Rendah, yang memiliki rentang nilai antara 61–70; e. Sangat Rendah, yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Dari capaian IP ASN Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah 87,40, dimana capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu 70 (sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian). Capaian IP ASN Dinas Kesehatan tinggi karena pegawai Dinas Kesehatan aktif mengikuti pelatihan yang sesuai dengan tugas jabatannya baik secara luring maupun daring. Oleh karena itu, keaktifan dalam mengikuti pelatihan di tahun berikutnya harus dipertahankan dan dipertahankan guna meningkatkan profesionalitas dan mengembangkan kompetensi pegawai.

6. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan
 Dalam melaksanakan program kesehatan tentunya tidak semua program bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Karena tidak sedikit kendala yang dihadapi baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknis pelaksanaan program. Untuk melaksanakan program kesehatan yang dapat mencapai target, terkadang dibutuhkan inovasi/ terobosan dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan telah menetapkan target 4 inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi, artinya telah dilaksanakan dan berkelanjutan. Bahkan telah direplikasi di unit kerja/UPTD yang ada di Dinas Kesehatan. Sedangkan realisasinya adalah 5 inovasi antara lain:
 - 1) JUMAT CERIA (Cantik, Enerjik, Rajin, Inovatif dan Aktif) merupakan inovasi Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan stunting yaitu mencegah anemia pada remaja putri. Jumat Ceria dikemas dalam agenda

rutin pada hari Jumat untuk kampanye minum tambah darah secara serentak pada remaja putri di sekolah SMP, SMA sederajat di Kabupaten Mojokerto.

- 2) JUMAT BANGKIT (Pembinaan Kesehatan Instansi Terpadu) merupakan inovasi Dinas Kesehatan dalam upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular di kalangan pegawai pemerintah Kabupaten Mojokerto. Inovasi ini dikemas dalam agenda rutin skrining Kesehatan pegawai di instansi-instansi pemerintah se-Kabupaten Mojokerto di hari Jumat pertama setiap bulan. Skrining yang dilakukan meliputi pengukuran lingkar perut, tinggi dan berat badan, serta pengukuran tingkat resiko penyakit tidak menular seperti tes gula darah, kolesterol, dan asam urat. Jumat Bangkit juga menyediakan layanan konsultasi untuk mendapatkan gambaran hasil pemeriksaan.
- 3) SEHATI (Selasa Sehat Turunkan Stunting, AKI, AKB) merupakan inovasi Dinas Kesehatan sebagai upaya menekan angka stunting. Sehati digelar di Desa dengan peserta ibu dan balita. Dalam agenda Sehati ibu diedukasi agar mencukupi gizi putra-putrinya mulai dalam kandungan hingga usia 5 tahun.
- 4) SIP ONLINE adalah inovasi Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya perijinan tenaga Kesehatan. SIP online dihadirkan dalam bentuk website lengkap dengan *link* yang dapat diakses publik untuk pengajuan SIP dan monitoring status berkas perijinan.
- 5) TEROPONG SAKTI (Teropong Saat Anak Kelainan Mata dan Refraksi) adalah salah satu inovasi Puskesmas Ngoro yang telah meraih Top 30 Inovasi Terpuji dalam Kovablik Jatim tahun 2023. Teropong Sakti merupakan inovasi untuk mendeteksi kelainan dan gangguan refraksi mata pelajar yang dilakukan Puskesmas Ngoro dengan melaksanakan giat keliling ke sekolah SD, SMP dan SMA sederajat untuk pemeriksaan mata pelajar.

Pencapaian inovasi yang melebihi target di tahun 2023 adalah salah satu bukti dari komitmen Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di tahun 2023.

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, diperlukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dan target kinerja tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat pengukuran, evaluasi, dan analisa capaian

kinerja tahun 2023 dibandingkan target capaian tahun berkenaan dan realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	AHH	72,95	72,59	72,93	73,25
	IKM	85,49	84,57	84,49	84,58

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50	86,18	87,18	87,30
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,40%	79,37%	90,40%	88,94%
	Indeks Profesionalitas ASN	70	n/a	59,10	87,40
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	n/a	6 inovasi	5 inovasi

(sumber: dokumen LKJIP Dinas Kesehatan 2021-2022)

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Selain membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2023 juga dibandingkan dengan target realisasi kinerja masa akhir periode Renstra yang ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan melihat kemampuan dari realisasi kinerja tahun 2023 apakah sudah sesuai tingkat kemajuannya. Berikut capaian kinerja tahun 2023 yang dibandingkan dengan target realisasi akhir periode Rentra:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra (2026)	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	AHH	73,12	73,25	1,002
	IKM	84,46	84,58	1,001

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra (2026)	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,085 (A)	87,30 (A)	1,04
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,00%	88,94%	0,97
	Indeks Profesionalitas ASN	78	87,40	1,12
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	5 inovasi	

(sumber: dokumen Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026)

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 s.d. Akhir Periode Renstra

Dari tabel diatas dapat dilihat kemajuan dari masing-masing realisasi indikator kinerja. Diantaranya indikator kinerja yang sudah mencapai target akhir Renstra pada tahun 2023 adalah AHH, IKM, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan Indeks Profesionalitas ASN. Sedangkan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah masih perlu peningkatan lagi.

Selain dibandingkan dengan realisasi kinerja jangka menengah yaitu target akhir Renstra, indikator kinerja juga dapat dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi maupun nasional. Salah satunya adalah AHH Kabupaten Mojokerto dapat dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Timur dan AHH Nasional.

Indikator Kinerja	Kabupaten Mojokerto		Provinsi Jawa Timur		Nasional	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
AHH	72,93	73,25	74,57	74,87	73,70	73,93

(sumber: BPS Indonesia)

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022-2023 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022-2023

Pada tabel 3.5 capaian indikator kinerja AHH Kabupaten Mojokerto tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,32 dari tahun 2022. Kenaikan tersebut lebih besar daripada kenaikan AHH provinsi Jawa Timur yang naik sebesar 0,30 dan AHH nasional yang naik sebesar 0,23 dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian AHH Kabupaten Mojokerto tahun 2023 masih dibawah AHH

provinsi Jawa Timur dan AHH nasional. Oleh sebab itu, masih diperlukan upaya yang terintegrasi dengan berbagai pihak, baik lintas sektor, lintas program untuk mendukung capaian AHH.

Dari penjabaran capaian masing-masing indikator kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 di atas, dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan DPA Tahun Anggaran 2024 mendukung pencapaian AHH dan IKM. Dalam proses merealisasikan target kinerja pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan/penurunan capaian kinerja. Sehingga faktor-faktor tersebut harus dianalisis dan dicarikan solusinya. sebagaimana pada tabel 3.6 berikut:

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.50 (A);	87.30 (A)	Kurang optimalnya pemenuhan data dukung kinerja oleh Tim SAKIP Dinkes dikarenakan pergantian personel.	Mengoptimalkan pemenuhan data dukung kinerja oleh Tim SAKIP Dinkes. Memberikan reward sebagai bentuk apresiasi pada Tim SAKIP atas kinerjanya untuk memotivasi kinerja lebih baik lagi.
	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	4 inovasi	5 inovasi	Inovasi Dinas Kesehatan masih banyak disumbang dari Puskesmas	Mendorong pengelola program untuk menciptakan inovasi sebagai terobosan mengatasi masalah.
	Nilai RB Perangkat Daerah	85,17	74,77	Berdasarkan nilai RB tahun 2022	Penilaian RB tahun 2023 dilaksanakan di Tingkat Pemda.
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89,00%	88,94%	Tidak ada kendala, penyerapan anggaran tidak 100% namun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.	Tidak ada kendala, penyerapan anggaran tidak 100% namun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
	Indeks Profesionalitas ASN	70	87,40	ASN belum memiliki kesadaran untuk mengupload data dukung kompetensi yang sudah dimiliki karena	Sosialisasi dari subbag kepegawaian tentang pentingnya IP ASN pada ASN Perangkat Daerah dan cara mengisi aplikasi.

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				tidak merasa berkepentingan.	
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	82.00%	82.00%	100%	100%
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen (renja dan p-renja)	2 dokumen (renja dan p-renja)	Terjadi kekosongan JF perencanaan, beberapa kali terjadi pergantian PJ perencanaan, namun kurang kompeten.	Mengusulkan JF perencanaan ke Bagian Organisasi dan Bappeda untuk diusulkan ke Pusbindiklatren Bappenas.
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 laporan (evaluasi renja triwulan, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LPPD, LKPJ)	8 laporan (evaluasi renja triwulan, LKJIP, SAKIP, LPPD, LKPJ)	tidak ada kendala, penilaian RB dilaksanakan di tingkat pemda.	tidak ada kendala, penilaian RB dilaksanakan di tingkat pemda.
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89.00%	88.94%	Tidak ada kendala, penyerapan anggaran tidak 100% namun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.	Tidak ada kendala, penyerapan anggaran tidak 100% namun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	775 Orang/bulan	775 Orang/bulan	-	-
1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	-	-
BOP PUSKESMAS					
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	89%	89.00%	-	-
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-
1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	4 paket	4 paket	-	-
1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	-	-
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-
1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Kesehatan belum punya arsiparis	Arsip Dinas dikelola Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Umum mengikuti pelatihan-pelatihan kearsipan
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	89.00%	89.00%	-	-
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	-	-
1.02.01.2.08.04 Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	-	-
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	89%	89.00%	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit (15 mobil dan 20 sepeda motor)	35 unit (15 mobil dan 20 sepeda motor)	-	-
1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	35 unit	35 unit	-	-
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Penatausahaan BLUD dengan Baik	27 puskesmas	27 puskesmas	-	-
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Waktu Penyediaan BLUD	12 bulan	12 bulan	-	-
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Persentase Stunting; Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna; Persentase KLB yang Ditangani; Persentase ODF; Penghargaan Swastisaba (Kabupaten Sehat); Persentase Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan : R. Jalan dan R. Inap; Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target; Persentase Ketersediaan Jenis dan Jumlah Obat sesuai Standar; Persentase Ketersediaan	48.94/100,000 KH;	65/100,000 KH; (11 ibu/16,906)	AKI masih tinggi;	Terus berinovasi untuk menekan angka AKI, melakukan monitoring dan evaluasi mendalam terhadap faktor yang menyebabkan kematian ibu
		4.4/1,000 KH;	4/1,000 KH; (70 bayi/16,906)	-	-
		3.00%;	1.39%;	-	-
		34.00% (10 puskesmas);	100% (21 puskesmas, 26 klinik, 1 labkesda);	-	-
		56.00% (169 desa);	0.00%;	Status KLB sudah dicopot, tidak ada kasus KLB yang ditangani.	Status KLB sudah dicopot, tidak ada kasus KLB yang ditangani.
		100%;	100%;	-	-
		Swastisaba Padapa;	Swastisaba Padapa;	-	-
		99.65% & 6.40%;	99.73% & 0.27%;	-	-
		83.30% (10 indikator);	83.30% (10 indikator);	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Alkes sesuai Standar	99.26%;	100.00%;	-	-
		90%	99.70%	-	-
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Gedung Puskesmas yang Direhab; Jumlah Gedung Pustu yang Terpelihara dengan Baik; Jumlah Paket Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Jumlah Paket Pengadaan Obat, Vaksin; Jumlah Paket Pengadaan Bahan Habis Pakai; Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 puskesmas;	2 puskesmas;	-	-
		2 pustu;	2 pustu;	-	-
		11 paket;	11 paket;	-	-
		5 paket;	5 paket;	-	-
		1 paket;	1 paket;	-	-
		27 unit	27 unit	-	-
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	2 puskesmas (puskesmas kemlagi, puskesmas tawangsari)	2 puskesmas (puskesmas kemlagi, puskesmas tawangsari)	-	-
1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 pustu (pustu mrisen, pustu domas)	2 pustu (pustu mrisen, pustu domas)	-	-
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 paket	11 paket	-	-
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 paket	5 paket	-	-
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 unit (IPAL puskesmas Gedeg)	1 unit (IPAL puskesmas Gedeg)	-	-
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan yang Mencapai Target	30 layanan	30 layanan	-	-
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	18,350 Orang	16,090 Orang	tidak 100% bukan karena tidak terlayani, melainkan karena denominator menggunakan sasaran proyeksi sehingga tidak sesuai dengan besaran capaian, sebagian masyarakat mendapatkan layanan di Kab/Kota lain atau mobilitas masyarakat kota yang tinggi.	lebih cermat dalam perhitungan proyeksi sasaran agar lebih mendekati kondisi real di lapangan; mengevaluasi faktor-faktor eksternal penyebab capaian kurang optimal.
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	16,819 bumil	14,770 bumil	tidak 100% bukan karena tidak terlayani, melainkan karena denominator menggunakan sasaran proyeksi sehingga tidak sesuai dengan besaran capaian, sebagian masyarakat mendapatkan layanan di Kab/Kota lain atau mobilitas masyarakat kota yang tinggi.	lebih cermat dalam perhitungan proyeksi sasaran agar lebih mendekati kondisi real di lapangan; mengevaluasi faktor-faktor eksternal penyebab capaian kurang optimal.
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	16,018 bayi	14,829 bayi	tidak 100% bukan karena tidak terlayani, melainkan karena denominator menggunakan	lebih cermat dalam perhitungan proyeksi sasaran agar lebih mendekati kondisi real di

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				sasaran proyeksi sehingga tidak sesuai dengan besaran capaian, sebagian masyarakat mendapatkan layanan di Kab/Kota lain atau mobilitas masyarakat kota yang tinggi.	lapangan; mengevaluasi faktor-faktor eksternal penyebab capaian kurang optimal.
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	82,591 balita	74,793 balita	tidak 100% bukan karena tidak terlayani, melainkan karena denominator menggunakan sasaran proyeksi sehingga tidak sesuai dengan besaran capaian	lebih cermat dalam perhitungan proyeksi sasaran agar lebih mendekati kondisi real di lapangan.
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	33,807 orang	33,807 orang	-	-
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	753,877 orang	759,379 orang	-	-
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	159,521 orang	159,521 orang	-	-
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	339,893 orang	340,171 orang	-	-
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	26,571 orang	27,545 orang	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	2,193 orang	2,204 orang	-	-
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Pemeriksaan Suspek TB	10,433 orang	14,746 orang	-	-
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Ketersediaan Operasional KPA, Jumlah Pemeriksaan Suspek HIV	12 bulan, 18,053 orang	12 bulan, 21,447 orang	-	-
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5,200 Orang	6,017 orang	-	-
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	98 sekolah/ponpes	199 sekolah, 17 ponpes	Pemda belum mempunyai layanan rehabilitasi penyalahguna NAPZA sehingga target sub kegiatan adalah sekolah dan ponpes	Kegiatan pengelolaan pelayanan jiwa dan NAPZA tahun 2023 adalah penyuluhan ke sekolah dan pospes
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang Didistribusikan	setiap kasus dikirim spesimen	14 spesimen (11 kasus Difteri, 1 kasus AFP, 1 kasus campak, 1 kasus pertusis)	-	-
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Kesehatan Lainnya	Kesehatan Lainnya				
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 puskesmas	21 puskesmas, 26 klinik, 1 labkesda	Akreditasi faskes seharusnya dilaksanakan tahun 2019 dan 2020 namun tertunda karena adanya pandemi covid-19	Akreditasi faskes baik puskesmas, klinik, maupun labkesda dilaksanakan serentak pada tahun 2023
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	-	-
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	28 unit, 11 unit RS	28 unit, 11 unit RS	-	-
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	320,646 Keluarga	331,036 Keluarga	-	-
1.02.02.2.02.42 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Ketersediaan Data Berbasis Elektronik (E-Puskesmas, SPM, Erenggar, Website Subdomain)	4 data (Profil Kesehatan, IKM, Portal Satu data Palapa, Ranham);	4 data (Profil Kesehatan, IKM, Portal Satu data Palapa, Ranham); 4 portal (epuskesmas, spm bangsa, erenggar, website subdomain)	-	-
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola	4 data (Profil Kesehatan, IKM, Portal Satu data Palapa, Ranham)	4 data (Profil Kesehatan, IKM, Portal Satu data Palapa, Ranham)	-	-
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah RS yang Difasilitasi Perizinannya	11 RS	11 RS	-	-
1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	11 Unit	11 Unit	-	-
1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	11 Unit	11 Unit	-	-
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	11 Unit	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	75.00%	95%	-	-
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah (Medis dan Paramedis)	1.175 nakes	1.175 nakes	-	-
1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	246 orang (211 perawat ponkesdes, 35 nakes SDK)	235 orang (202 perawat ponkesdes, 24 nakes SDK)	tidak ada kendala. capaian 95% dari target persentase 75%.	jumlah pengadaan nakes sesuai arahan surat menpan yaitu tidak boleh menambah dan/ mengganti tenaga
1.02.03.2.02.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	211 perawat, 11 dokter, 22 nakes (dokter umum 7, dokter gigi 4, gizi 8, analis 1, D3 farmasi 13)	202 perawat, 8 dokter, 16 nakes (dokter umum 6, dokter gigi 2, gizi 5, analis 1, D3 farmasi 10)	jumlah pengadaan nakes sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran	jumlah pengadaan nakes sesuai arahan surat menpan yaitu tidak boleh menambah dan/ mengganti tenaga
1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotik, Toko Obat, UMOT dan PIRT yang Memenuhi Standar	57.00%;	47.17%;	tidak ada kendala, izin apotek toko obat, umot dan PIRT dilayani	tidak ada kendala, izin apotek toko obat, umot dan PIRT dilayani sesuai jumlah pemohon.
		100.00%;	100.00%;		
		100.00%;	100.00%;		
		120 sertifikat (81.00%);	115 sertifikat (87.00%);		

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kesehatan : Apotek (55 apotik); Toko Obat (2 toko obat); UMOT (1 UMOT); PIRT (1900); Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Syarat / Standar Kesehatan	20.00%	100.00%	sesuai jumlah pemohon.	
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	55 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50 apotik, 1 toko obat, 1 umot, 115 sertifikat PIRT	tidak ada kendala, izin apotek toko obat, umot dan PIRT dilayani sesuai jumlah pemohon.	tidak ada kendala, izin apotek toko obat, umot dan PIRT dilayani sesuai jumlah pemohon.
1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 apotek	50 apotek	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen apotik	50 apotek	50 apotek	-	-
1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	3 sertifikat	0 sertifikat	Tidak ada produsen Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga baru yang mendaftar	Menjadwalkan sosialisasi pada publik baik secara langsung maupun melalui media sosial tentang regulasi bagi produsen Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga baru
1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga yang Diterbitkan	120 sertifikat	115 sertifikat	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120 Dokumen	115 dokumen	-	-
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang Diterbitkan	70%	88%	-	-
1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	70% dari 406 TPM (284 TPM)	362 TPM yang dibina laik HSP	-	-
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan Post Market yang Dilakukan	120 pemeriksaan	120 sampel pemeriksaan	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	120 pemeriksaan	120 sampel pemeriksaan	-	-
1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS; Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang Aktif	73.00%; 82,90%	75,89%; 92,67%	-	-
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1 kegiatan (Gebyar HKN)	1 kegiatan (Gebyar HKN)	-	-
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan tentang PHBS	33 kelompok	33 kelompok	-	-
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

Uraian Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi/ Capaian Kinerja	Analisa Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Posyandu yang Dibina dan Naik Stratanya	18 UKBM	18 UKBM	Setiap Kecamatan diambil 1 posyandu yang dinaikkan stratanya	Setiap Kecamatan diambil 1 posyandu yang dinaikkan stratanya
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-

(sumber: LKPJ Dinas Kesehatan 2023)

Tabel 3.6 Analisis Permasalahan Penyebab Peningkatan atau Penurunan Kinerja dan Solusi Yang Dilakukan.

Disamping analisis permasalahan penyebab peningkatan atau penurunan kinerja dan solusi yang dilakukan, capaian kinerja juga dianalisis menurut efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Efisiensi = input\ target / input\ actual \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input actual lebih besar atau sama dengan 1, maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input actual kurang daripada 1, maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi anggaran atas kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan secara keseluruhan dinilai tercapai atau efisien karena input yang ditargetkan berbanding lebih besar dari 1. Perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	AHH	100,40%	88,94%	1,13 (tercapai)
	IKM	98,94%	88,94%	1,11 (tercapai)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,70%	87,31%	1,14 (tercapai)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	98,38%	88,94%	1,11 (tercapai)
	Indeks Profesionalitas ASN	125,29%	87,31%	1,44 (tercapai)
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	125%	87,31%	1,43 (tercapai)

(sumber: Renja Dinas Kesehatan 2023)

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Anggaran Atas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Selain ditunjang oleh anggaran yang mencukupi, keberhasilan capaian kinerja juga ditunjang oleh program/kegiatan sesuai perjanjian kinerja. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan masing-masing sasaran sesuai perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

NO	SASARAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	61,250,954,522	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
				Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi
				Nilai RB Perangkat Daerah
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
				Indeks Profesionalitas ASN
2	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96,577,251,841	Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Persentase Stunting; Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna; Persentase KLB yang Ditangani; Persentase ODF; Penghargaan Swastisaba (Kabupaten Sehat); Persentase Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan : R. Jalan dan R. Inap; Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target; Persentase Ketersediaan Jenis dan Jumlah Obat sesuai Standar; Persentase Ketersediaan Alkes sesuai Standar
3	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,292,697,000	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar

NO	SASARAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA
4	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	152,474,400	Persentase Apotik, Toko Obat, UMOT dan PIRT yang Memenuhi Standar Kesehatan: Apotek (55 apotik); Toko Obat (2 toko obat); UMOT (1 UMOT); PIRT (1900); Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Syarat / Standar Kesehatan
5	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,166,778,062	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS; Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang Aktif

(sumber: Renja Dinas Kesehatan 2023)

Tabel 3.8 Program/kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai total Rp. 250.634.361.490 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 222.914.199.552 atau 88,94%.

Berikut capaian realisasi anggaran kegiatan dan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	Dinas Kesehatan									
		Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.50 (A);	87.30 (A)	126,577,727,187	110,515,926,239	
					Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	4 inovasi	5 inovasi			
					Nilai RB Perangkat Daerah	85,17	74,77			
					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89,00%	88,94%			
					Indeks Profesionalitas ASN	70	87,40			
			1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	82.00%	82.00%	12,000,000	11,558,050	
			1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen (renja dan p-renja)	2 dokumen (renja dan p-renja)	6,500,000	6,438,050	99.05%
			1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 laporan (evaluasi renja triwulan, LKJIP, SAKIP, PMPRB, LPPD, LKPJ)	8 laporan (evaluasi renja triwulan, LKJIP, SAKIP, LPPD, LKPJ)	5,500,000	5,120,000	93.09%
			1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89.00%	88.94%	68,724,576,962	58,566,258,217	
			1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	775 Orang/bulan	775 Orang/bulan	59,414,664,446	49,572,220,411	83.43%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	496,751,076	434,769,890	87.52%
				BOP PUSKESMAS				8,813,161,440	8,559,267,916	97.12%
			1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	89%	89.00%	284,539,000	275,491,811	
			1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	5,000,000	3,755,000	75.10%
			1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	19,497,000	19,485,000	99.94%
			1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	64,000,000	62,948,250	98.36%
			1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	26,120,000	25,320,000	96.94%
			1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	2,780,000	92.67%
			1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	4 paket	4 paket	40,000,000	38,409,450	96.02%
			1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	7,000,000	5,735,000	81.93%
			1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	69,922,000	67,164,111	96.06%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	49,895,000	99.79%
			1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	89.00%	89.00%	923,304,000	909,632,786	
			1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	200,904,000	193,632,786	96.38%
			1.02.01.2.08.04	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	722,400,000	716,000,000	99.11%
			1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	89%	89.00%	56,633,307,225	50,752,985,375	
			1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit (15 mobil dan 20 sepeda motor)	35 unit	94,696,000	92,595,000	97.78%
			1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	35 unit	35 unit	25,000,000	23,880,000	95.52%
			1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Penatausahaan BLUD dengan Baik	27 puskesmas	27 puskesmas	56,513,611,225	50,636,510,375	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Waktu Penyediaan BLUD	12 bulan	12 bulan	56,513,611,225	50,636,510,375	89.60%
			1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Persentase Stunting; Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna; Persentase KLB yang Ditangani; Persentase ODF; Penghargaan Swastisaba (Kabupaten Sehat); Persentase Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan : R. Jalan dan R. Inap; Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target; Persentase Ketersediaan Jenis dan Jumlah Obat sesuai Standar; Persentase Ketersediaan Alkes sesuai Standar	48.94/100,000 KH; 4.4/1,000 KH; 3.00%; 34.00% (10 puskesmas); 56.00% (169 desa); 100%; Swastisaba Padapa; 99.65% & 6.40%; 83.30% (10 indikator); 99.26%; 90%	65/100,000 KH; (11 ibu/16,906) 4/1,000 KH; (70 bayi/16,906) 1.39%; 100% (21 puskesmas, 26 klinik, 1 labkesda); 0.00%; 100%; Swastisaba Padapa; 99.73% & 0.27%; 83.30% (10 indikator); 100.00%; 99.70%	96,577,251,841.00	89,761,776,989.00	
			1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Gedung Puskesmas yang Direhab; Jumlah Gedung Pustu yang Terpelihara dengan Baik; Jumlah Paket Pengadaan Alat	2 puskesmas; 2 pustu; 11 paket; 5 paket;	2 puskesmas; 2 pustu; 11 paket; 5 paket;	15,323,526,981	13,032,816,633	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
					Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Jumlah Paket Pengadaan Obat, Vaksin; Jumlah Paket Pengadaan Bahan Habis Pakai; Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket; 27 unit	1 paket; 27 unit			
			1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	2 puskesmas (puskesmas kemlagi, puskesmas tawangsari)	2 puskesmas (puskesmas kemlagi, puskesmas tawangsari)	5,364,383,841	4,080,763,611.00	76.07%
			1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 pustu (pustu mrisen, pustu domas)	2 pustu (pustu mrisen, pustu domas)	1,500,000,000	1,180,148,450.00	78.68%
			1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 paket	11 paket	2,790,765,548	2,614,175,929.00	93.67%
			1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 paket	5 paket	814,706,592	696,014,500.00	85.43%
			1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	1 paket	4,553,671,000	4,161,714,143.00	91.39%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 unit (IPAL puskesmas Gedeg)	1 unit (IPAL puskesmas Gedeg)	300,000,000	300,000,000.00	100.00%
			1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan yang Mencapai Target	30 layanan	30 layanan	80,289,510,686	76,127,339,476	
			1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	18,350 Orang	16,090 Orang	2,869,176,339	2,668,303,652.00	93.00%
			1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	16,819 bumil	14,770 bumil	626,300,820	205,841,500.00	32.87%
			1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	16,018 bayi	14,829 bayi	1,150,157,457	956,035,000.00	83.12%
			1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	82,591 balita	74,793 balita	587,532,010	536,917,280.00	91.39%
			1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	33,807 orang	33,807 orang	3,355,974,455	3,326,778,600.00	99.13%
			1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	753,877 orang	759,379 orang	594,219,400	583,186,700.00	98.14%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	159,521orang	159,521orang	1,976,773,300	1,613,837,880.00	81.64%
			1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	339,893 orang	340,171 orang	2,007,290,725	1,816,034,443.00	90.47%
			1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	26,571 orang	27,545 orang	1,178,786,287	1,168,331,500.00	99.11%
			1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	2,193 orang	2,204 orang	369,266,251	347,777,800.00	94.18%
			1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Pemeriksaan Suspek TB	10,433 orang	14,746 orang	73,595,000	66,720,000.00	90.66%
			1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Ketersediaan Operasional KPA, Jumlah Pemeriksaan Suspek HIV	12 bulan, 18,053 orang	12 bulan, 21,447 orang	625,137,125	552,692,750.00	88.41%
			1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	39,365,000.00	98.41%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	14,713,177,862	13,588,181,810.00	92.35%
			1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	104,602,281	96,021,000.00	91.80%
			1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	378,314,780	365,122,200.00	96.51%
			1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	158,925,351	152,188,000.00	95.76%
			1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	32,598,300	32,589,400.00	99.97%
			1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	730,509,769	98,454,500.00	13.48%
			1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5,200 Orang	6,017 orang	109,453,000	108,328,000.00	98.97%
			1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	98 sekolah/ponpes	199 sekolah, 17 ponpes	102,998,587	101,501,200.00	98.55%
			1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	857,696,230	384,175,000.00	44.79%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	44,301,104,458	44,227,791,565.00	99.83%
			1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang Didistribusikan	setiap kasus dikirim spesimen	14 spesimen (11 kasus Difteri, 1 kasus AFP, 1 kasus campak, 1 kasus pertusis)	8,500,000	5,500,000.00	64.71%
			1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	158,020,000	157,996,200.00	99.98%
			1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK PUSKESMAS)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
			1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	2,350,000,000.00	2,270,048,946.00	96.60%
			1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 puskesmas	21 puskesmas, 26 klinik, 1 labkesda	400,000,000.00	302,459,750.00	75.61%
			1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	223,381,299.00	162,558,800.00	72.77%
			1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	33,600,000.00	23,550,000.00	70.09%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	28 unit,11 unit RS	28 unit,11 unit RS	105,000,000.00	103,718,400.00	98.78%
			1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	320,646 Keluarga	331,036 Keluarga	15,419,600	13,417,000.00	87.01%
			1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1 Dokumen	1 Dokumen	52,000,000.00	51,915,600.00	99.84%
			1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Ketersediaan Data Berbasis Elektronik (E-Puskesmas, SPM, Erenggar, Website Subdomain)	4 data (Profil Kesehatan, IKM, Portal Satu data Palapa, Ranham);	4 data (Profil Kesehatan, IKM, Portal Satu data Palapa, Ranham); 4 portal (epuskesmas, spm bangsa, erenggar, website subdomain)	147,651,000.00	146,876,200.00	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola	4 data (Profil Kesehatan, IKM, Portal Satu data Palapa, Ranham)	4 data (Profil Kesehatan, IKM, Portal Satu data Palapa, Ranham)	105,000,000.00	104,508,000.00	99.53%
			1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	42,651,000.00	42,368,200.00	99.34%
			1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah RS yang Difasilitasi Perizinannya	11 RS	11 RS	816,563,174.00	454,744,680.00	
			1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	11 Unit	11 Unit	18,000,000.00	12,249,000.00	68.05%
			1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	11 Unit	11 Unit	18,000,000.00	12,085,000.00	67.14%
			1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	11 Unit	780,563,174.00	430,410,680.00	55.14%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	75.00%	95%	8,292,697,000	6,633,910,500	
			1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah (Medis dan Paramedis)	1.175 nakes	1.175 nakes	120,000,000	106,500,000	
			1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	106,500,000	88.75%
			1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	246 orang (211 perawat ponkesdes, 35 nakes SDK)	235 orang (202 perawat ponkesdes, 24 nakes SDK)	8,172,697,000	6,527,410,500	
			1.02.03.2.02.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	954,360,000	803,500,000	84.19%
			1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	211 perawat, 11 dokter, 22 nakes (dokter umum 7, dokter gigi 4, gizi 8, analis 1, D3 farmasi 13)	202 perawat, 8 dokter, 16 nakes (dokter umum 6, dokter gigi 2, gizi 5, analis 1, D3 farmasi 10)	7,190,400,000.00	5,704,650,500.00	79.34%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27,937,000.00	19,260,000.00	68.94%
			1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotik, Toko Obat, UMOT dan PIRT yang Memenuhi Standar Kesehatan : Apotek (55 apotik); Toko Obat (2 toko obat); UMOT (1 UMOT); PIRT (1900); Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Syarat / Standar Kesehatan	57.00%; 100.00%; 100.00%; 120 sertifikat (81.00%); 20.00%	47.17%; 100.00%; 100.00%; 115 sertifikat (87.00%); 100.00%	152,474,400	130,906,511	
			1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Usaha Mikro Obat Tradisional	55 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50 apotik, 1 toko obat, 1 umot, 115 sertifikat PIRT	19,600,000	15,350,000	
			1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	13,250,000	88.33%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 apotek	50 apotek	2,100,000	2,100,000	100.00%
			1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen apotik	50 apotek	50 apotek	2,500,000	-	0
			1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	3 sertifikat	0 sertifikat	4,000,000	3,850,000	
			1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	3,850,000	96.25%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga yang Diterbitkan	120 sertifikat	115 sertifikat	74,374,400	62,606,511	
			1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120 Dokumen	115 dokumen	74,374,400	62,606,511	84.18%
			1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang Diterbitkan	70%	88%	18,000,000	18,000,000	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	70% dari 406 TPM (284 TPM)	362 TPM yang dibina laik HSP	18,000,000	18,000,000	100.00%
			1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan Post Market yang Dilakukan	120 pemeriksaan	120 sampel pemeriksaan	36,500,000	31,100,000	
			1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	120 pemeriksaan	120 sampel pemeriksaan	22,780,000	20,600,000	90.43%
			1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	13,720,000	10,500,000	76.53%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS; Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg Aktif	73.00%; 82,90%	75,89%; 92,67%	1,166,778,062	1,077,954,400	
			1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1 kegiatan (Gebyar HKN)	1 kegiatan (Gebyar HKN)	277,345,121	269,545,800	
			1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	277,345,121	269,545,800	97.19%
			1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan tentang PHBS	33 kelompok	33 kelompok	97,280,000	97,251,200	
			1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	97,280,000	97,251,200	99.97%
			1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Posyandu yang Dibina dan Naik Stratanya	18 UKBM	18 UKBM	792,152,941	711,157,400	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI/ CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	792,152,941	711,157,400	89.78%
				BOK PUSKESMAS					17,867,433,000	14,793,724,913
TOTAL								250,634,361,490	222,914,199,552	88.94%

(sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan)

Pada tabel 3.9 di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 terbagi menjadi 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 61,250,954,522,-. Total realisasi anggaran sebesar Rp 51.320.147.948,- (87,31%) masih kurang optimal karena ada sisa anggaran hampir di semua sub kegiatan. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN penyerapan anggaran tidak optimal (83,43%) dikarenakan pada tahun berkenaan terdapat ASN yang meninggal, pensiun, dan juga mutasi. Sedangkan pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi sebesar 81,93% juga kurang optimal dikarenakan intensitas tamu dinas yang difasilitasi kurang dari target yang diperkirakan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 kegiatan dan 44 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 96.577.251.841,-. Total realisasi anggaran sebesar Rp 89.761.776.989,- (92,94%) masih belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian satuan standar harga untuk komponen-komponen belanja baru. Sehingga dilakukan pergeseran antar rekening belanja dan koordinasi lebih lanjut dengan bidang anggaran.

Yang perlu dicermati adalah pada sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan realisasinya hanya 13,48%, sangat jauh dari 100% karena penyerapan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pagu anggaran untuk sub kegiatan tersebut mendapatkan penambahan SILPA dari BOK Puskesmas 2022 sebesar Rp 617.465.769,- dan BOK tahun 2023 sebesar Rp 113.044.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp 730.509.769,-, namun anggaran tersebut hanya untuk perjalanan dinas dalam kota saja. Disamping itu sudah dicabutnya status pandemi covid-19 menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak menyerap anggaran tersebut karena sudah tidak ada kegiatan pelacakan kasus dan dikhawatirkan tidak sesuai juknis yang berlaku di tahun 2023.

Penambahan SILPA dari BOK Puskesmas 2022 juga terjadi pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Anggaran yang dialokasikan untuk transport rujukan ibu bersalin tersebut tidak diserap secara optimal dikarenakan ibu bersalin kebanyakan memilih pergi ke faskes rujukan/RS secara mandiri tanpa diantar petugas rujukan. Disamping itu beberapa pasien jaminan Kesehatan BPJS mandiri yang biaya transport rujukannya diklaimkan pada BPJS Kesehatan sehingga mengurangi volume transport rujukan untuk petugas puskesmas.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 8.292.697.000,-. Total realisasi anggaran sebesar Rp 6.633.910.500,- (79,99%). Meskipun realisasi anggaran program belum 100% namun dalam capaian kinerja pengadaan tenaga kesehatan tidak mengalami kendala. Jumlah pengadaan tenaga Kesehatan tahun 2023 sesuai dengan arahan surat dari Kemenpan yaitu tidak boleh menambah dan atau mengganti tenaga kesehatan. Sehingga penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, terdiri 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 152.474.400,-. Total realisasi anggaran sebesar Rp 130.906.511,- (85,85%). Realisasi anggaran belum 100% karena menyesuaikan capaian kinerja pemberian izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan PIRT, yaitu sesuai jumlah pemohon. Selain itu, tidak ada produsen Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga baru yang mendaftar
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 1.166.778.062,-. Total realisasi anggaran sebesar Rp 1.077.954.400,- (92,39%). Realisasi anggaran ketiga sub kegiatan mendekati 100%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan transaksi epurchasing mengharuskan proses tawar menawar harga sehingga harga kesepakatan sering kali tidak sama dengan standar harga yang sudah ditentukan di DPA dan menyisakan anggaran.

Masing-masing program diampu oleh Sekretariat dan 4 bidang antara lain bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan bidang Sumber Daya Kesehatan. Meskipun demikian, program-program tersebut tidak bisa dipisahkan karena merupakan rangkaian satu sama lain dalam mendukung pencapaian AHH dan IKM.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023. Dimana laporan ini menggambarkan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto meliputi program/kegiatan/sub kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kesehatan yang diberikan pada Masyarakat Kabupaten Mojokerto di tahun 2023. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, maka Dinas Kesehatan harus selalu menjaga kualitas kinerja karena berkaitan langsung dengan tingkat derajat kesehatan Masyarakat.

Adapun keberhasilan/kegagalan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, anggaran atas kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 secara keseluruhan dinilai tercapai atau efisien. Meskipun demikian, capaian anggaran yang sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan program/kegiatan/sub kegiatan dinilai belum optimal dikarenakan terdapat sisa anggaran yang bersumber dari SILPA BOK Puskesmas 2022, yang menyebabkan persentase realisasi anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan. Diharapkan di tahun mendatang Tim SAKIP Dinas Kesehatan dapat memenuhi target pengukuran dan evaluasi kinerjanya dengan lebih baik lagi.
3. Perlu digarisbawahi bahwa capaian IKM perlu lebih ditingkatkan, karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan Kesehatan yang diberikan pada Masyarakat.
4. Capaian indikator kinerja AHH, Indeks Profesionalitas ASN, dan jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sudah baik bahkan melebihi target yang ditetapkan. Untuk kedepannya perlu dilakukan inovasi-inovasi yang lebih kreatif lagi untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2023, yang mana ada yang mencapai target, dan ada yang tidak tercapai, maka tindak lanjut yang bisa dilaksanakan kedepannya antara lain:

1. Melaksanakan monitoring capaian kinerja setiap bulan, triwulan, sehingga apabila ada kendala pencapaian kinerja dapat dicari solusi dalam upaya peningkatan capaian kinerja.
2. Memperbanyak inovasi program untuk mendukung capaian target kinerja.
3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pembangunan kesehatan membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari pemerintah, swasta dan masyarakat.



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

dr. ULUM ROKHMAT ROKHMAWAN, M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19741113 200604 1 008

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA APBD 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ULUM ROKHMAT ROKMAWAN, M.H

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO



dr. ULUM ROKHMAT ROKMAWAN, M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19741113 200604 1 008

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	AHH	72,95
		IKM	85,49
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	85,17
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50
		Rata-rata capaian indikator program: - AKI 48,94/100.000 KH; - AKB 4.4/100,000 KH; - Persentase Stunting 3%; - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 34.00% (10 puskesmas) - Persentase Desa KLB 56.00% (169 desa); - Persentase ODF (desa ODF) 100% - Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat) - Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap 99,65% dan 6,4% - Persentase Indikator SPM yang mencapai target 83,3% (10 indikator) - Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar 99,26% - Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar 90% - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar 75% - Persentase Apotik yang memenuhi standar kesehatan 57%(55 apotek)	80%

		- Persentase Toko Obat yang memenuhi standar kesehatan 100% - Persentase Umot yang memenuhi standar kesehatan 100% - Persentase penerbitan sertifikat PIRT 81% (120 sertifikat) - Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan 20% - Persentase Rumah Tangga BerPHBS 85% - Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif 98%	
		- Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90,40%
		- Indeks Profesionalitas ASN	70
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	110.715.158.400	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.576.355.600	APBD,
		38.901.665.000	DAK
		8.949.271.812	DBHCHT
		23.601.184.279	Pajak Rokok
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	6.992.400.000	APBD
		982.297.000	DAK

4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	253,368,000	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	317.425.000	APBD
		967.787.000	DAK

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO



dr. ULUM ROKHMAT ROKHMAWAN, M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19741113 200604 1 008

2. PERJANJIAN KINERJA P-APBD 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ULUM ROKHMAT ROKMAWAN, M.H

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, November 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. ULUM ROKHMAT ROKMAWAN, M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19741113 200604 1 008

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	AHH	72,95
		IKM	85,49

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,40%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	70
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	126.577.727.187	P.APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	114.140.758.841	P.APBD, DAK, DBHCHT, Pajak Rokok
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	8.292.697.000	P.APBD, DAK
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	152.474.400	P.APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.470.704.062	P.APBD
Jumlah		250.634.361.490	

Mojokerto, November 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. ULUM ROKHMAT ROKHMAWAN, M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19741113 200604 1 008

3. DATA PENDUKUNG LAINNYA

A. PRESTASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

No.	Bidang/Kategori	Jenis Penghargaan
1	Penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kategori Pelaporan Indikator Ketersediaan Obat Vaksin di Puskesmas. Terbaik 1 Puskesmas Pungging	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2	Penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kategori Pelaporan Indikator Ketersediaan Obat Vaksin di Puskesmas. Terbaik 2 Puskesmas Jatirejo	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



3	Penghargaan Juara 1 Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
---	---	-------------------------------------



No.	Bidang/Kategori	Jenis Penghargaan
4	Penghargaan Juara 1 Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023	Kementerian Kesehatan RI
		
5	Penghargaan Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023 (Puskesmas Kemlagi)	Kementerian Kesehatan RI
		
6	Penghargaan Swasti Saba Kategori Padapa Tahun 2023	Kementerian Kesehatan RI
		

B. INOVASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

1. JUMAT CERIA (Cantik, Enerjik, Rajin, Inovatif dan Aktif)



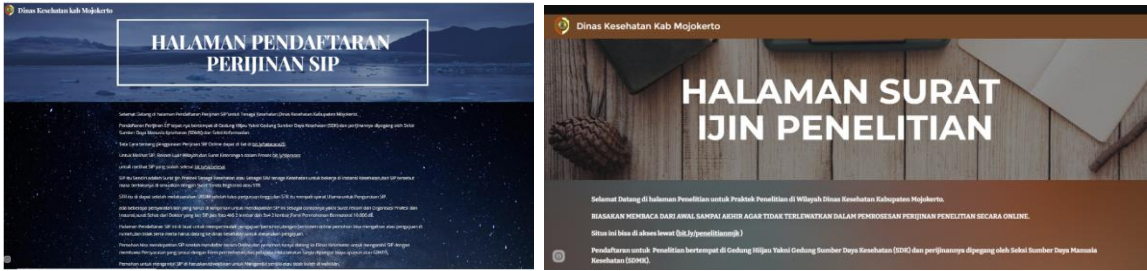
2. JUMAT BANGKIT (Pembinaan Kesehatan Instansi Terpadu)



3. SEHATI (Selasa Sehat Turunkan Stunting, AKI, AKB)



4. SIP ONLINE



5. TEROPONG SAKTI (Teropong Saat Anak Kelainan Mata dan Refraksi)



C. IKU DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN

Jalan R.A. Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113
Website : <http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/dinkes>
Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR :188.4/346/416-102.E/ 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
 - 11 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Pertama : Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan menjadi acuan ukuran kinerja Dinas Kesehatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- Kedua : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja di awal tahun APBD dan pada Perubahan APBD yang disampaikan kepada Bupati Mojokerto.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

dr. ULUM ROKHMAT R. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197411132006041008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KAB. MOJOKERTO
NOMOR : 188.4/ 346/416-102.E/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	KET
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	IKM	Nilai yang dihasilkan dari Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di UPT dan Unit Perijinan Dinas Kesehatan	
		AKI	Kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan /Jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100.000 KH	
		AKB	Jumlah seluruh kematian bayi dalam kurun (1-11 bulan) di suatu wilayah pada waktu tertentu/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x1000 KH	
		Persentase Stunting	Jumlah balita pendek + sangat pendek / Balita diukur x 100%	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Jumlah faskes yang terakreditasi paripurna / Jumlah faskes yang ada x 100%	
		Persentase Desa KLB	Jumlah Desa yang mengalami KLB /Jumlah desa yang ada x 100%	
		Persentase ODF (desa ODF)	Jumlah desa Open Defecation Free (ODF) / Jumlah Desa seluruhnya x 100%	
		Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	Jumlah nilai penghargaan Kab Sehat > 60%	
		Persentase kunjungan masyarakat ke faslitas kesehatan : R Jalan dan R	Jumlah kunjungan rawat jalan / Jumlah seluruh kunjungan di faskes x 100% Jumlah kunjungan rawat inap / Jumlah seluruh kunjungan di	

		Inap	faskes x 100%	
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	Jumlah Indikator SPM yang mencapai target / Jumlah Indikator SPM x 100%	
		Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	Jumlah dan Jenis obat yang sesuai standar /J umlah obat yang ada disarana fasilitas kesehatan x 100%	
		Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	Jumlah dan Jenis Alkes sesuai standar / Jumlah alkes yang ada x 100%	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standar / Jumlah Puskesmas x 100%	
		Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan		
		- Apotik	Jumlah apotek yang memenuhi standar kesehatan / jumlah apotek x 100%	
		- Toko Obat (2 toko obat)	Jumlah toko obat yang memenuhi standar kesehatan / jumlah toko obat x 100%	
		- Umot (1 umot)	Jumlah UMOT yang memenuhi standar kesehatan / jumlah UMOT x 100%	
		- PIRT (1900)	Jumlah sertifikat yang diterbitkan / jumlah pengajuan sertifikat x 100%	
		Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	Jumlah Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Syarat atau Standar Kesehatan / Jumah Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)) x 100%	
		Persentase Rumah Tangga BerPHBS	Jumlah Rumah tangga berPHBS / Jumlah Rumah tangga yang disurvei x 100%	

		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	Jumlah UKBM yang aktif / Jumlah UKBM x 100%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	Jumlah Indikator Program yang tercapai / Jumlah Indikator Program yang ada x 100%	
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Jumlah Realisasi Anggaran / Jumlah Anggaran yang tersedia x 100%	
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Profesionalitas ASN	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai yang dihasilkan dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja	
		Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai yang dihasilkan dari 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	



KEPALA DINAS KEEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. ULUM ROKHMAT R, MH

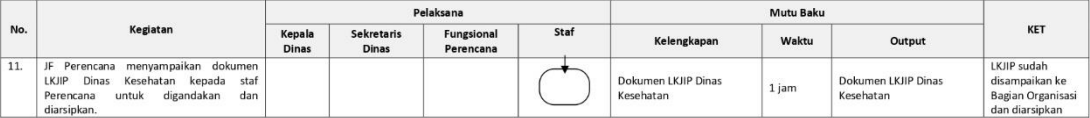
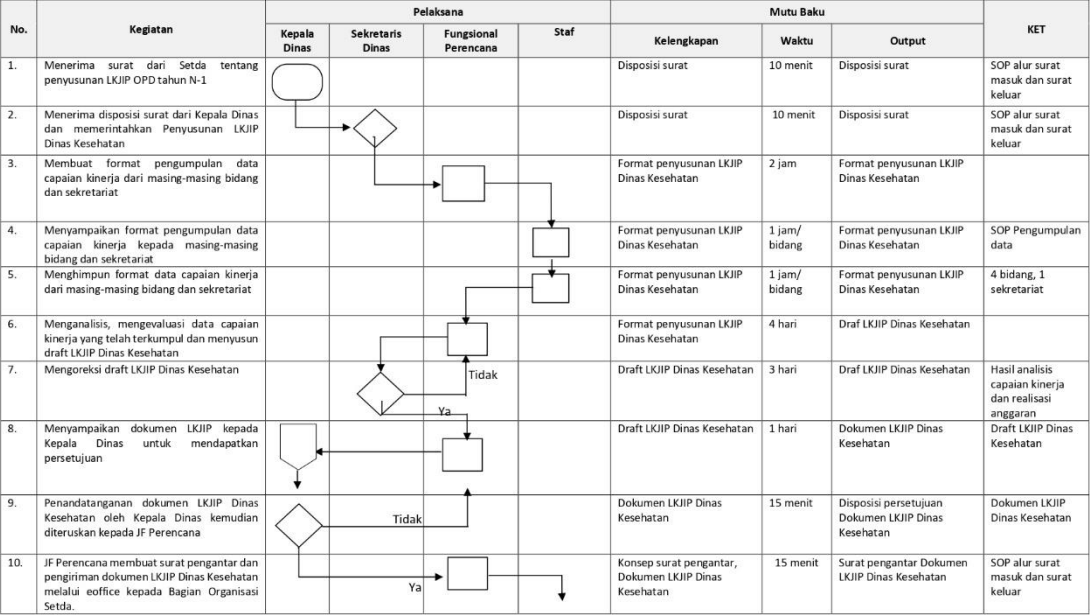
Pembina Tingkat I

NIP. 197411132006041000

D. SOP PENYUSUNAN LKJIP

	Nomor SOP	445/7462.B/416-102.E/2023
	Tgl Pembuatan	16 November 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	16 November 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN Jl. RA. Basuni No. 4 Jampirogo Sooko Telp. (0321) 321957 MOJOKERTO	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KESEHATAN dr. UTUM ROKHMAT R, M.H. NIP.197411132006041008
DINAS KESEHATAN	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memiliki pemahaman tentang sistematika dan teknis penyusunan LKJIP. 2. Memiliki kemampuan dalam menganalisis data kinerja SKPD. 3. Memiliki kemampuan dalam menganalisis Laporan Realisasi Anggaran SKPD.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala SKPD 4. Laporan capaian kinerja SKPD 5. Laporan realisasi anggaran SKPD 6. Format penyusunan LKJIP 7. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi Microsoft office 8. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan LKJIP tidak akan berjalan lancar	Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja	

URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN



FORM PENGUKURAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Anggaran		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8

E. SOP PENGUMPULAN DATA

	Nomor SOP	445/7394.A/416-102.E/2023
	Tgl Pembuatan	15 November 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	15 November 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN Jl. RA. Basuni No. 4 Jampirogo Sooko Telp. (0321) 321957 MOJOKERTO	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KESEHATAN dr. ULUM ROKHMAT R, M.H. NIP.197411132006041008
SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	1. Memahami Sistem Perencanaan 2. Memahami Sistem Penatausahaan Keuangan 3. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan LKJIP SOP Pengukuran Kinerja	1. SDM 2. Laptop 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan optimal	Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja

URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DINAS KESEHATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Fungsional Perencana	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun laporan kinerja					Instruksi	10 menit	Disposisi Kepala Dinas	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Sekretaris memfasilitasi rapat Bersama Kepala Bidang, Kasubag, PJ program dan pejabat fungsional dalam Menyusun laporan kinerja					Instruksi	10 menit	Disposisi Kepala Dinas	SOP alur surat masuk dan surat keluar
3.	Menugaskan perencana untuk memfasilitasi pengumpulan data dari bidang dan sekretariat					Disposisi Kepala Dinas	30 menit	Disposisi Sekretaris	SOP alur surat masuk dan surat keluar
4.	Mengumpulkan data dari pejabat fungsional, melakukan verifikasi, mengolah, mengonsep dan menugaskan staf untuk Menyusun draft laporan kinerja					Data, Renja, DPA	14 jam	Draft laporan kinerja	
5.	Mengetik draft dan menyerahkan draft pada perencana					Draft laporan kinerja	1 jam/ bidang	Draft laporan kinerja	4 bidang, 1 sekretariat
6.	Mengoreksi draft laporan kinerja dan menyerahkan draft pada Sekretaris			Tidak		Draft laporan kinerja, Renja, DPA	4 hari	Draft laporan kinerja	
7.	Mengoreksi draft laporan kinerja dan menyerahkan draft pada Kepala Dinas			Ya		Draft hasil laporan kinerja	3 hari	Draf hasil koreksi laporan kerja	
8.	Menandatangani laporan kinerja					Draf hasil koreksi laporan kerja	1 hari	Laporan kinerja	Laporan kinerja diarsipkan,

F. SOP PENGUKURAN KINERJA

	Nomor SOP	445/7395.A/416-102.E/2023
	Tgl Pembuatan	15 November 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	15 November 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN Jl. RA. Basuni No. 4 Jampirogo Sooko Telp. (0321) 321957 MOJOKERTO	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KESEHATAN dr. ULUM ROKHMAT R, M.H. NIP.197411132006041008
SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGUKURAN KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	1. Memiliki kewenangan dalam pengukuran kinerja 2. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 3. Memiliki kemampuan Menyusun pengukuran kinerja
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan Renja SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja SOP Penyusunan Laporan Kinerja	1. SDM 2. Laptop 3. Printer 4. ATK 5. Dokumen Renstra, Renja
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan pengukuran kinerja tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja

URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Fungsional Perencana	Tim SAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun laporan pengukuran kinerja						Format penyusunan pengukuran kinerja	10 menit	Format penyusunan pengukuran kinerja	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Sekretaris memfasilitasi JF perencana dan Tim SAKIP dalam melaksanakan pengukuran kinerja						Format penyusunan pengukuran kinerja	10 menit	Disposisi Kepala Dinas	SOP alur surat masuk dan surat keluar
3.	Membuat format pengukuran kinerja						Format penyusunan pengukuran kinerja	1 hari	Draft pengukuran kinerja	
4.	Mengumpulkan format pengumpulan data dan pengolahan pengukuran kinerja						Draft pengukuran kinerja	1 hari	Konsep dokumen pengukuran kinerja	
5.	Membahas dan mengevaluasi data pengukuran kinerja						Draft pengukuran kinerja	1 hari	Draft laporan kinerja	
6.	Membuat konsep dokumen pengukuran kinerja dan mengajukan kepada Kepala Dinas						Konsep dokumen pengukuran kinerja	1 hari	Dokumen pengukuran kinerja	
7.	Mengoreksi draft laporan kinerja dan menyerahkan draft pada Kepala Dinas						Dokumen pengukuran kinerja	1 hari	Dokumen pengukuran kinerja	
8.	Menandatangani dokumen pengukuran kinerja						Dokumen pengukura kinerja	1 hari	Dokumen pengukuran kinerja yang telah ditandatangani	SOP Penandatanganan Surat dan Berkas
9.	Mendokumentasikan dokumen pengukuran kinerja untuk penilaian SAKIP						Dokumen pengukuran kinerja yang telah ditandatangani	1 hari	Arsip	



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya R.A. Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113
Website: dinkes.mojokertokab.go.id
Email: dinkeskabmojokerto@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 188.4/7309.A/416-102.E/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 di Dinas Kesehatan perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023
- b. Bahwa mereka yang namanya disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang SAKIP;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP;
- 6. Peraturan Bupati Mojokerto No. 77 Tahun 2021 tentang

Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tatanan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023**
- Pertama :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua :** Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai
tugas sebagai berikut :
- 1. Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan
Kabupaten Mojokerto;
 - 2. Menyusun analisa, saran perbaikan, dan rencanatindak
lanjut Hasil Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
 - 3. Menyusun rencana target yang dilaksanakan pada
tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
 - 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan
ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat :**

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 10 November 2023


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**
dr. ULUM ROKHMAT R, M.H.
Pembina Tk I
NIP. 197411132006041008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.4/7309.A/416-102.E/2023
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	NAMA JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
3.	Sekretaris	Moch. Arif Budi Santoso, S.Kep.Ners (PJ Penyusunan Program)
4.	Anggota:	a. Bidang P2P Moch. Yusron, M.Kes (Adminkes Ahli Muda) b. Bidang Kesmas dr. Nunun Agung Lubiantoro (Adminkes Ahli Muda) c. Bidang Yankes Suti Alfati, S.Tr.Keb (PJ Rujukan) d. Bidang SDK Aris Dermawan (PJ Kefarmasian) e. Triana Yulastuti, S.KM, M.Kes (Kasubag Keuangan)



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

dr. ULUM ROKHMAT R, M.H.
Pembina Tk I
NIP.197411132006041008